TAJUK RENCANA

Jangan Beri Angin KKB Korban Terus Berjatuhan

SETELAH membunuh 11 pendulang emas, masih ada pula yang disandera, dan ujung-ujungnya bisa saja mereka meminta tanggung tebusan atau dalam bentuk kompensasi lain.

Adalah Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani yang mengatakan sepasang suami istri pendulang emas di pedalaman Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, saat ini disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Selain pasuruh, delapan orang pendulang emas lainnya dilaporkan terpisah dari rombongan dan belum diketahui keberadaannya. Namun kabar sedih dan mengenaskan, tidak kurang 11 pendulang meninggal dalam insiden yang terjadi Minggu (6/4) dan Senin (7/4) di lokasi 22 dan Muara Kum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Peristiwa pembunuhan itu dilakukan KKB yang menamakan dirinya sebagai Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama. Korban pembunuhan tersebut mengalami luka bacok, tembakan, serta luka akibat panah. Saat ini, 35 orang korban selamat mengamankan diri di Kampung Mabul, Distrik Koroway, Kabupaten Asmat.

Kita menilai tindak kekerasan dan penyerangan terhadap warga pendulang emas yang dilakukan KKB itu merupakan tragedi kemanusiaan. KKB berindak sadis dan biadab untuk kepentingan kelompoknya (separatis). Apapun alasannya tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan norma hukum dan adat masyarakat setempat. Sama halnya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, KKB menjadi musuh utama Polri dan TNI.

Intisari:

"Harus ada opsi-opsi terukur kepada KKB. Yang intinya, KKB dengan berbagai kelompoknya di Papua wajib disikat habis demi NKRI"

Sayang upaya pemberantasan KKB tidak berjalan maksimal sehingga KKB mampu menghindar dan membuat teror-teror berlanjut baik kepada masyarakat lokal (sipil), aparat pemerintahan dearah hingga aparat keamanan. Peristiwa kerap kali menggaung hingga luar negeri sebagai propaganda politik.

Hematakita keberadaan KKB di Papua sangat mengakibatkan masyarakat. Berulang kali KKB melakukan penyerangan, merusak fasilitas umum, termasuk membunuh orang-orang tak berdosa, seperti pendatang, guru/pendidik, petugas Puskesmas sampai anggota dari Polri dan TNI mengjadi incaran KKB. Tujuannya jelas ingin merusuh dan merusak stabilitas keamanan seakan-akan kondisi di Papua tidak aman.

Sudah banyak korban di pihak Polri dan TNI akibat serangan mendadak ke markas keamanan yang jauh dari kota, bahkan menunggu di saat aparat keamanan lengah untuk diberondong dengan senjata canggih. Kita sebut senjata canggih karena mirip yang dipunyai TNI yang berasal dari pasar gelap dan hasil rampasan saat KKB menyerang pos-pos keamanan.

Mantan Kapolsek Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Iptu (Purn) Djamal Renhoat (62), kemarin tewas diduga akibat ditembak anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Ibu, jenazah dievakuasi ke Timika. Sebelumnya, Kodim XVII/Cendrawasih menyatakan KKB menyerang dan membakar rumah guru hingga menewaskan enam orang guru di Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Aksi yang dilakukan KKB itu biadab, karena membunuh dan membakar korban yang ada di dalam rumah dalam keadaan hidup.

Melihat kebiadaban KKB dan keberadaannya di hutan Papua serta berbaur dengan warga lokal maka pemerintah pusat dan daerah, bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua harus bisa mengidentifikasi kebutuhan KKB. Tidak cukup dengan melabeli mereka teroris, separatis atau pemberontak yang ingin memisahkan Papua dari NKRI. Harus ada opsi keras terhadap KKB, seperti halnya ABRI/TNI menghadapi GAM (Aceh Merdeka) di masa lalu. Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat dan daerah, seperti operasi militer hingga mundeknya kesadaran dari tokoh-tokoh GAM untuk menyerahkan senjata dan mengalihkan konflik dari kekerasan dengan Mou Helsinki. Ini, pengalaman yang GAM hidup senang, sebagai pengusaha, anggota dewan dan pejabat pemerintah, antara lain Muzakir Manaf yang kini menjadi Gubernur Aceh. Rakyat Aceh pun sentosa tak lagi dikejar-kejar/bunuh.

Jusuatu jangan pernah menyerah dalam perjuangan dan penyajian terhadap KKB dan kelompok besar maupun Lesel. Menjadi PR Pasukan TNI dan Kapolri untuk ungkapkan wahyu dari Tuhan dalam kebaikan dan kebahagiaan KKB. Jangan melakukan manuver biadab yang dapat merepotkan Satgas Operasi Damai Cartenz. Harus ada opsi-opsi terukur kepada KKB. Yang intinya, KKB jangan diberi angin lagi melihat korban terus berjatuhan selama ini.+

Surat Pembaca

Proyek Miliaran Tak Kunjung Selesai, Ada Apa?

Banjir rob kembali merendam ribuan rumah di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, pada Senin (31/03/2025). Ketinggian air mencapai 2,8 meter dan bertahan selama berjam-jam, memaksa ribuan masyarakat gagal bersilaturahmi di Hari Raya Idulfitri. Enam kelurahan terdampak, yaitu Belawan I, Belawan II, Bagan Deli, Belawan Bahagia, Sicanang, dan Belawan Bahari. Warga mengeluhkan proyek benteng penahan banjir yang tak kunjung selesai meski telah berjalan lebih dari satu tahun dengan anggaran miliaran rupiah.

Banjir rob di Belawan bukan sekadar fenomena alam, tetapi dampak dari buruknya tata kelola negara dalam melindungi rakyatnya. Pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang seperti pembangunan di daerah rawan banjir yang membangun kolam-kolam atau tambak ikan yang telah ditimbun oleh perusahaan swasta, hilangnya sejumlah resapan air seperti hutan bakau yang berperan penting sebagai penahan air laut. Ditambah fakta lainnya juga, bahwa proyek benteng penahan banjir tidak kunjung selesai.

Hal ini menunjukkan rendahnya kepedulian pemerintah terhadap penderitaan rakyat.

Bagaimana mungkin bangunan dari suatu fasilitas publik tidak dibangun secepat mungkin balikan menunggu waktu lama pada hal ini menyangkut kemaslahatan bersama. Bukan menjadi jaminan juga lamanya pembangunan infrastruktur banteng penahan air dapat dipakai jangka panjang, karena sejauh yang sudah-sudah seringkali diterukan infrastruktur yang dibangun pemerintah untuk masyarakat hanya bertahan jangka pendek terlepas cepat atau lamanya pengerjaan.

Apakah penerapan bangunan yang ada memang "sengaja" dibuat berumur pendek sehingga setiap tahun harus ada renovasi fisik terlebih dengan adanya ancaman perubahan musim? Bukankah yang demikian itu juga berpotensi pada pemborosan anggaran negara untuk pembiayaan renovasi? Jika demikian adanya, ini jelas-jelas menunjukkan bahwa antisipasi dan mitigasi terhadap bencana, maupun pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik terkait dengan potensi kebencanaan tersebut tidak menggunakan visi yang benar.

Wajar hal ini tersebut terjadi, karena negara ini masih memakai sistem kapitalisme, sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini menjadikan pembangunan sebagai ajang bisnis, bukan pelayanan terhadap rakyat. Proyek-proyek infrastruktur sering kali hanya menjadi ladang korupsi dan kepentingan segelintir elit. Hal ini tampak dari proyek banteng penahan air yang telah berjalan satu tahun lebih namun tidak tuntas, sementara rakyat terus menderita. Sudah menjadi rahasia umum kapitalisme, yaki ti rakus dalam mencari keuntungan suatu kawasan. Karakter materialistis kapitalisme telah jelas tampak mata membuahkan pembangunan infrastuktur yang setengah-setengah. Padahal proyek tersebut sudah dilakukan kurang lebih satu tahun lamanya.

Lantas bagaimana Islam memandang?

Islam bukan sekedar dogma spiritual belaka, namun mencakup aspek intelektual, sosial, dan praktik yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dari ritual hingga interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Pandangan Islam dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan dapat diterima oleh akal manusia, baik muslim maupun non-muslim. Untuk mengatasi banjir dan genangan, pemimpin yang berada pada sistem Islam tentu saja memiliki kebijakan canggih dan efisien. Kebijakan tersebut mencakup sebelum, ketika, dan pasca banjir.

Dalam sistem pemerintahan Islam, negara memiliki kewajiban penuh dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat, termasuk dalam menghadapi bencana. Pemimpin yang berada dalam sistem Islam akan membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya dengan dana yang murni dialokasikan pada proyek tersebut, tidak ada korupsi di dalamnya. Negara juga akan membangun kanal atau pun saluran drainase untuk mengurang dan memecah jumlah air dalam jumlah besar agar mengalir ke tempat lain yang lebih aman. Secara berkala, negara akan melakukan pengerukan lumpur-lumpur di sungai atau daerah aliran air untuk mencegah terjadinya pendangkalan.

Kita juga bisa melihat fakta sejarah yang pernah mencatat aksi pemimpin yang berada dalam sistem Islam dalam menhadapi persoalan banjir. di masa kekhilafahan 'Abbasiyyah, untuk mengatasi banjir maka dibangunlah beberapa bendungan di Kota Baghdad, Irak. Bendungan-bendungan itu terletak di sungai Tigris. Model bendungan yang dibangun oleh insinyur muslim pun beragam. Bahkan, model-model bendungan modern banyak mengadopsi model bendungan yang diciptakan oleh kaum Muslim.

Karena itu, Islam adalah solusi seluruh problem kehidupan, sekaligus jalan keselamatan. Tidak hanya menyelamatkan mereka dari bencana di dunia, tetapi juga bencana yang lebih berat di akhirat kelak. Wallahualam bissawab.

Habsah

Milad Dan Muktamar PUI

Oleh Shohibul Anshor Siregar

...momentum untuk merekonstruksi peran umat Islam sebagai subjek, bukan objek, sejarah. Dengan menolak rezim pengetahuan kolonial, menguatkan ekonomi syariah, dan membangun solidaritas global, PUI dapat menjadi mercusuar peradaban yang berdaulat.

MILAD ke-107 dan Muktamar ke-15 Persatuan Umatat Islam (PUI) yang akan diselenggarakan di Medan pada bulan depan, diharapkan tak mengabaikan pentingnya menumuskan sikap dan kebijakan organisasi terkait "dekolonisasi ummah dan exit plan dari bayang neokolonialisme dan neoliberalisme global".

Artikel ini menganalisis peran PUI dalam konteks tantangan Islamofobia, neokolonialisme, dan neoliberalisme di Indonesia. Dengan merujuk pada beberapa pendekatan kualitatif seperti 2014–2020), kajian kritis terhadap kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan literatur global tentang keamanan dan kolonialisme, artikel ini mengeksposbagaimana rezim sekuritisasi Indonesia, yang didikte oleh agenda Global War on Terror (GWOT) AS, telah melemahkan kemandirian umat Islam melalui stigmatisasi dan represi.

Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) menjadi salah satu studi kasus yang menunjukkan kontinuitas kekerasan negara dari era Orde Baru hingga kini. Artikel ini menyerukan dekolonisasi sistem pengetahuan, ekonomi, dan hukum, serta merekomendasikan model perlawanan berbasis nilai Qur'ani dan solidaritas global.

Dari Kolonialisme Ke Neokolonialisme

Milad ke-107 dan Muktamar ke-15 PUI terjadi dalam konteks yang di dalamnya kebijakan sekuritisasi Indonesia, seperti UU Terorisme No. 5/2018, telah dibentuk oleh tekanan AS melalui program Countering Violent Extremism (CVE) dan dampaknya terus berlanjut.

Data riset lapangan (2014–2020) menunjukkan bahwa BNPT, dengan anggaran Rp854 miliar (2019), lebih fokus pada stigmatisasi gerakan Islam daripada penanganan ancaman nyata seperti kemiskinan (14,9%, 2018) atau kematian akibat rokok (290.000 jiwa/tahun). Padahal, Surah Ali Imran (3:104) menegaskan peran umat Islam sebagai penyeru kebaikan (amar ma'ruf nahi munkar), bukan objek represi negara.

Warisan Kolonial

Studi Dave McRae (2020) dan Bijlmakers tode Taal, Land en Volkenkunde (BKI) mengungkap bahwa pembubaran FPI mencerminkan pola kekerasan negara (state violence). Seperti UU Subversi era Soeharto, UU Terorisme No. 5/2018 menggunakan definisi ambigu "radikalisme" untuk membungkam kritik. Laporan Setara Institute (2020) menunjukkan bahwa 67% kasus "radikalisme" ditujukan pada aktivis yang menolak kebijakan neoliberal, seperti privatisasi sumber daya alam.

Keterlibatan AS bukanlah sesuatu hal baru. Jess Melvin (2017) membuktikan keterlibatan CIA dalam genosida 1965, misalnya dokumen telegram AS (dilangkap The New York Times, 2020) menunjukkan pola intervensi yang berlanjut dalam GWOT. Program CVE yang diadopsi BNPT misalnya, mengabaikan akar masalah terorisme, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial, dan fokus pada deradikalisasi ideologis yang bertujuan stigmatisasi.

Neoliberalisme & Penghisapan Ekonomi

David Harvey (2005) dalam A Brief History of Neoliberalism menjelaskan bagaimana neoliberalisme mengonsentrasikan kekayaan pada korporasi global. Di Indonesia, liberalisasi sektor keuangan (misalnya, UU Minerba 2020) telah mengusir 2,4 juta UMKM (Kemenkop, 2021). Studi Siddiqi (2012) tentang ekonomi syariah menawarkan alternatif berbasis keadilan, tetapi kebijakan BNPT justru mengalokasikan 60% anggaran untuk operasi intelijen daripada pemberdayaan ekonomi umat.

Pembubaran FPI

Pembubaran FPI pada 2020 adalah salah satu puncak monumental dari kebijakan sekuritisasi yang didikte AS. Menurut McRae (2020), pembubaran ini tidak hanya melanggar Pasal 28E UUD 1945 (kebebasan berserikat), tetapi juga mengganggu 154 pesantren dan 23 klinik kesehatan milik FPI yang melayani masyarakat marginal. Global Terrorism Database (2019) menunjukkan bahwa ancaman terorisme di Indonesia hanya menyebabkan 0,1% kematian dibandingkan kecelakaan lalu lintas (31.000 jiwa/tahun) atau AIDS (640.000 kasus aktif).

Kebijakan ini adalah bentuk neocolonial governance (Duffield, 2007), yang di dalamnya keterjeratan negara bekas jajahan mengadopsi agenda keamanan Barat untuk mendapatkan legitimasi politik. Contohnya, BNPT menerima pelatihan dari FBI dan CIA (Allard & Kapoor, 2016), sedangkan program deradikalisasi mereka meniru model AS yang gagal di Irak dan Afghanistan. Studi Koehler (2017) membuktikan bahwa pendekatan represif justru meningkatkan radikalisasi sebesar 22%.

Islamofobia & Rasisme Struktural

Islamofobia di Indonesia termanifestasi dalam kebijakan yang mengkriminalisasi simbol-simbol Islam seperti cadar atau ceramah keagamaan. Laporan Wahid Institute (2019) mencatat 123 kasus diskriminasi terhadap perempuan bercadar di sektor publik. Kebijakan ini berakar pada orientalisme (Said, 1978) yang memandang Islam sebagai ancaman, sebagaimana tertuat dalam doktrin GWOT AS yang menyamakan "Islam radikal" dengan terorisme (Montague, 2020).

Rekomendasi: Menuju Dekolonisasi Ummah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa rekomendasi penting perlu dikemukakan. Pertama, Tuntutan Reparasi: Keadilan Historis bagi Indonesia dalam Kerangka Dekolonial. Kolonialisme Belanda di Indonesia selama 350 tahun, misalnya, meninggalkan warisan eksploitasi sistemik, mulai dari Cultuurstelsel (1830–1870) yang memicu kelaparan massal hingga kekerasan militer pasca-kemerdekaan seperti pembantaian 40.000 orang di Sulawesi Selatan (1946–1947) (Van Zanden, 2013; LIPI, 2020).

Namun, Belanda hingga kini enggan mengakui tanggung jawab penuh, meski preseden global seperti kompensasi *1,1 miliar Jerman kepada Namibia atas genosida Herero dan Nama (1904–1908) menunjukkan bahwa reparasi bukan utopia (DW, 2021). Komisi Reparasi CARICOM, yang menuntut pertanggungjawaban negara Eropa atas perdagangan budak transatlantik, memperkuat argumen bahwa reparasi adalah hak hukum dan moral bangsa terjajah (Beckles, 2013).

Secara ekonomi, studi Thomas Piketty (2019) membuktikan 70% kekayaan Belanda abad ke-19 berasal dari eksploitasi kolonial, sementara Indonesia terjebak dalam ketergantungan pasca-kemerdekaan. Padahal, Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Reparasi (2005) menjamin restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Kasus Mau Mau di Kenya, korban penyiksaan kolonial Inggris menerima kompensasi £19,9 juta pada 2013, menjadi preseden hukum yang relevan (The Guardian, 2013).

Advokasi reparasi adalah bagian integral dari misi amar ma'ruf nahi munkar. PUI dapat memprakarsai koalisi untuk: (1) mendorong pengakuan resmi Belanda atas kejahatan kolonial, (2) mengajukan gugatan melalui mekanisme Universal Jurisdiction, dan (3) mengadvokasikan dana reparasi untuk pembangunan wilayah terdampak seperti Papua, yang infrastrukturnya 43% lebih buruk daripada Jawa (BPS, 2023). Reparasi bukan sekadar materi, tetapi pengakuan bahwa kolonialisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan—sesuai semangat Surah An-Nisa (4:148) tentang hak korban untuk menuntut keadilan.

Tuntutan reparasi adalah pilar tak terpisahkan dari perjuangan dekolonisasi. Sebagai bangsa yang kekayaannya dijarah untuk membiayai Revolusi Industri Eropa, Indonesia berhak menuntut pertanggungjawaban ekonomi dan moral.

Kedua, Reformasi Sistem Pendidikan. PUI harus memelopori kurikulum dekolonial yang menggabungkan maqasid syariah dengan kajian kritis terhadap neoliberalisme. Pesantren di Pati, Jawa Tengah, telah mengintegrasikan pertanian organik dan ekonomi syariah, mengurangi ketergantungan pada pasar global sebesar 40% (Riset PPIM, 2019).

Pendekatan ini selaras dengan kritik Edward Said (1978) terhadap Orientalism, karena sistem pendidikan kolonial memingginkan epistemologi Islam. Studi Foucault (2007) tentang governmentality juga mengungkap bagaimana neoliberalisme menyusup melalui kurikulum yang menormalisasi logika pasar. Karena itu, harus dirancang modul pembelajaran yang mengeksposakar kolonial dalam kebijakan pendidikan nasional, seperti standardisasi kurikulum berbasis OECD yang mengabaikan kearifan lokal (Merry, 2016).

Ketiga, Ekonomi Syariah sebagai Perlawanan. Koperasi syariah bersama NU dan Muhammadiyah dapat menjadi alternatif. Di Malaysia, model ini berhasil meningkatkan pendapatan 2,3 juta UMKM (Data Bank Negara Malaysia, 2020). Perlu dibangun "kampung halal" berbasis komunitas, seperti di Sukabumi yang mengurangi kemiskinan dari 15% menjadi 7% dalam 3 tahun.

Keempat, Advokasi Hukum dan HAM. Kasus FPI harus diusut ulang dengan melibatkan mekanisme HAM internasional, sebagaimana dilakukan korban genosida 1965 (Melvin, 2018). UU Terorisme No. 5/2018 adalah produk legal colonialism yang mengadopsi agenda AS dalam Global War on Terror (GWOT). McRae (2020) dalam analisisnya di BKI menunjukkan bagaimana definisi "terorisme" dalam UU ini ambigu dan rentan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi gerakan Islam.

Kelima, Solidaritas Global Anti-Imperialis. Bersama organisasi yang memiliki integritas dan reputasi yang diakui, PUI perlu membentuk aliansi untuk menuntut pertanggungjawaban AS atas kejahatan perang di Afghanistan dan Palestina. Kampanye boikot produk Israel, seperti yang dilakukan civil society di berbagai negara, dapat direplikasi untuk digencarkan.

Solidaritas global umat Islam harus melampaui retorika, menjadi gerakan politik konkret. Motadel (2014) dalam Islam and the European Empires menunjukkan bagaimana kolonialisme Eropa abad ke-19 memecah-belah umat Islam melalui kebijakan divide et impera. Kini, neoliberalisme dan GWOT menjadi alat neoimperialisme yang sama.

PUI perlu membangun aliansi strategis untuk menuntut pertanggungjawaban AS atas kejahatan perang di Afghanistan, dengan 47.245 warga sipil tewas (2001–2021) menurut Brown University Cost of War Project. Studi Kundnani (2014) dalam The Muslims are Coming! juga mengingatkan bahwa deradikalisasi ala Barat hanya alat kontrol politik, bukan solusi. Seperti dikatakan Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth, "dekolonisasi adalah proses mengganti dunia kolonial' dengan 'dunia manusia baru'".

Kesimpulan: PUI Sebagai Gerakan Dekolonial

Milad ke-107 dan Muktamar ke-15 PUI adalah momentum untuk merekonstruksi peran umat Islam sebagai subjek, bukan objek, sejarah. Dengan menolak rezim pengetahuan kolonial, menguatkan ekonomi syariah, dan membangun solidaritas global, PUI dapat menjadi mercusuar peradaban yang berdaulat.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Fath (48:29), umat Islam harus "keras terhadap kekafiran, tetapi berbelas kasih antar sesama", prinsip yang menuntut perlawanan terhadap ketidakadilan, tanpa mengorbankan kemanusiaan.

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Ketua Lembaga Hikmah Dan Kebijakan Publik PW Muhammadiyah Sumut, Ketua Lembaga Ukhuwah Umat Islam MUI Sumut.

TI Bukan Keinginan Tapi Kebutuhan

Oleh Erwan Efendi

Bagi pengguna teknologi informasi dibutuhkan tanggung jawab moral, baik dari penyedia/provider maupun pengguna sehingga pemanfaatannya dapat didasari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, etika, estetika, dan kearifan para penggunanya

SISTEM berita dan teknologi digital ketika ini sangat berkembang sangat pesat sejalan menggunakan besarnya kebutuhan terhadap sistem info. Perkembangan teknologi informasi (TI) tidak tinggal asal pesatnya perkembangan personal komputer, karena komputer merupakan media yang bisa memberikan kemudahan bagi manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Sistem ius merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan serta mendapatkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan info buat menunjang pengambilan keputusan dan supervisi pada suatu organisasi dan membantu manajer dalam mengambil keputusan serta menyediakan pihak luar dengan laporan-laporan yang dibutuhkan.

Perkembangan, perubahan dan dinamika masyarakat yang semakin cepat seiring menggunakan perkembangan zaman dan teknologi memerlukan kualitas berita yang seksama, cepat serta sempurna. Teknologi gossip kelisu satu contoh produk teknologi yang berkembang pesat yang dapat manusia dalam mengola data dan menyajikan sebuah sistem berita yang berkualitas buat menyediakan isu tersebut diperlukan suatu indera atau media untuk menyajikan berita tersebut, keliru satunya website.

TI didefinisikan dengan sejumlah definisi berbeda, beberapa di antaranya mencakup pembuatan, penerapan, dan penggunaan berbagai alat atau sistem untuk pembuatan, penyimpanan, modifikasi, dan penggunaan informasi dalam format berbeda. Teknologi informasi tidak hanya mencakup teknologi komputer tetapi juga teknologi komunikasi yang digunakan untuk pemrosesan, penyimpanan, pengiriman, dan penyebaran informasi.

Seringkali, teknologi informasi dikonseptualisasikan sebagai kumpulan instrumen yang memfasilitasi komunikasi dan pemrosesan informasi. Hal ini pentingutuk kemampuan beradaptasi dan saing budaya perusahaan, khususnya dalam konteks perdagangan online. Cara kita memperoleh dan bertukar informasi telah banyak diubah dengan pengunaan teknologi informasi dalam komunikasi, khususnya internet.

Beberapa bidang akademik, termasuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan administrasi pemerintahan, telah mengkaji penggunaannya dengan penekanan pada perlunya pengunaan yang tepat. Perlindungan legislatif tetap diperlukan karena adanya kemungkinan terjadinya perilaku ilegal di sektor teknologi informasi. Salah satu strategi untuk meningkatkan efektivitas pemerolehan bahasa adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi pada khususnya.

Fungsi Teknologi Informasi mencakup berbagai aspek, mulai dari menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, hingga mentransmisikan informasi. Tujuan dari Teknologi Informasi adalah membantu manusia dalam memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Selain itu, TI juga digunakan untuk menciptakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Dalam konteks bisnis, Teknologi Informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Sementara itu, dalam konteks pemerintahan, Teknologi Informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Peranan teknologi informasi dalam kehidupan kita sangat berarti. Seperti ketika kita hendak memberi kabar kepada saudara kita di luar kota melalui telepon, handphone, atau e-mail. Ketika mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia, kita dapat mengetahuinya dengan cara menyaksikan siaran televisi, mendengarkan radio, membaca surat kabar dan majalah, atau membuka suatu situs internet (Muhammad Syafi'i, Emigawaty, Nita Rosa Damayanti, 2017).

Salah satu teknologi informasi yang banyak digunakan untuk keperluan adalah komputer. Berbagai alat seperti kalkulator, mesin ATM, alat-alat medis, kamera digital, dan mesin hitung menggunakan bakti nyata manfaat komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pada dasarnya teknologi informasi berperan penting dengan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dalam memperoleh dan memperpertinggi kualitas hidup manusia.

Adapun dampak terhadap teknologi informasi yaitu: Dampak Positif Keberadaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Artinya, teknologi informasi dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Pada saat kita menggunakan telepon, menonton televisi, mendengarkan radio, mengerjakan tugas dengan komputer, dan menggunakan fasilitas internet, manfaat apa yang kita rasakan? Tentu saja manfaat yang telah dijelaskan di atas. Informasi dari belahan dunia dapat diterima dengan cepat dan mudah melalui televisi, radio, surat kabar, majalah, atau internet.

Untuk menghubungi orang lain yang berada di suatu tempat yang jauh menjadi lebih mudah dan cepat dengan menggunakan telepon, handphone, atau e-mail. Di lain dari pendidikan, dampak teknologi informasi berpotensi untuk membangun masyarakat yang demokratis. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan antara guru dan siswa, siswa dan siswa, guru dan guru, dan antara guru, siswa, orangtua, dan masyarakat dalam kaitannya dengan proses pendidikan di dalam dan di luar sekolah. Teknologi informasi dapat menjadi sebuah alat yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dunia untuk mencapai sasaran utama dari pembangunan, yaitu kemiskinan, jaminan kesehatan, dan pendidikan yang lebih efektif dari sebelumnya.

Dengan perkembangan teknologi informasi, batas-batas negara menjadi hilang, demikian pula antara pendidikan, bisnis, media sehingga berdampak pada aspek kehidupan, perdagangan, hiburan, pemerintahan, pola kerja, dan pola produksi. Semua ini tidak lepas dari dampak teknologi informasi. Dampak Negatif Perkembangan teknologi informasi seringkali bagi sebagai kebaikan atau kemudahan bagi para pengguna nya. Namun, ketika nalar, kemampuan, dan keimanan kita belum memadai untuk mengikuti perkembangan tersebut. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya meninbulkan dampak positif, tetapi juga mempunyai dampak negatif.

TI adalah salah satu faktor kunci yang mendorong kemajuan peradaban modern. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, TI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia atau TI bukan lagi jadi keinginan tapi kebutuhan. Peranannya dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, keamanan, dan lingkungan sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup. Namun, pengunaan TI harus diiringi dengan kesadaran akan potensi dampak negatifnya, seperti ancaman privasi dan penyebaran informasi palsu. Semoga.

Penulis adalah Dosen Komunikasi UINSU, Wartawan Harian Waspada Medan.

SUDUT BATUAH

- **Rico Waas, wujudkan Medan bersih butuh dukungan**
  - *Awak pun butuh dukungan, he...he...he*
- **Negara Eropa minta warganya siaga perang**
  - *Kayaknya semakin dekat perang dunia*
- **Turki sampai Arab Saudi tolak relokasi warga Gaza**
  - *Kok cuma kita yang mau ya?*

Wak Doel

Dipindai dengan CamScanner